

BAB VI PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Fenomena mundurnya Jepang dari IWC telah banyak dibahas oleh para pemikir, mulai dari rasionalis, konstruktivis, dan lain sebagainya, juga banyak dikupas menggunakan berbagai teori yang ada. Kini penulis mencoba menganalisis kasus ini menggunakan konsep *strategic culture* milik Iain Alastair Johnston. Inti dari konsep ini adalah bahwa negara dapat memutuskan suatu keputusan atau membuat kebijakan yang unik dan tidak sejalan dengan norma internasional, atas dasar budaya nasionalnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan nasionalnya. Johnston juga menyebutkan bahwa sebesar apapun desakan dari luar (internasional) dan berbagai faktor rasional yang dapat dijadikan dasar pembentukan kebijakan, budaya nasional menjadi kunci yang besar juga dalam hal ini. Disebutkan bahwa budaya ini berasal dari sejarah nasional. Adapun dijelaskan oleh Johnston dalam karyanya tahun 1998 bahwa selain sejarah nasional, faktor domestik seperti dinamika politik, kepentingan elit, dan media massa juga ikut andil dalam langkah suatu negara merasionalkan kebijakannya yang irrasional dan menyimpang dari norma internasional. Begitupun dalam kasus ini, dapat dianalisis bahwa Jepang mengundurkan diri dari IWC karena kegiatan perburuan paus telah ada jauh sebelum masehi (budaya makan paus atau *gyoshuka bunka*), juga dihormati dan masuk ke dalam pengajaran sinkretisme agama mayoritas di Jepang yakni asimilasi dari Animisme, Shintoisme, dan Budha.

Selain fakta tersebut, kegiatan perburuan paus memang memiliki tempat spesial dalam pemerintahan Jepang. Walau semakin lama minat memakan paus semakin memudar, namun birokrat pemerintah, khususnya Badan Perikanan dan MAFF yang menjadi aktor tertinggi dalam mengatur kebijakan soal kegiatan perburuan paus, tetap mengagungkan kegiatan ini sebagai bentuk mempertahankan budaya dan harga dirinya di hadapan internasional. Pergeseran

Fira Najwah, 2024

ANALISIS KONSEP STRATEGIC CULTURE TERHADAP PENARIKAN DIRI JEPANG DARI ORGANISASI INTERNATIONAL WHALING COMMISSION PADA TAHUN 2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

status organisasi IWC menjadi pendukung negara *anti whaling* membuat Jepang merasa terancam dan dianggap oleh Jepang sebagai intervensi terhadap budayanya yang mana menjadi tidak selaras dengan kepentingan nasionalnya. Pemerintah seolah menunjukkan bahwa apapun keadaannya, Jepang tidak akan berhenti melakukan perburuan paus karena kegiatan tersebut telah menjadi *image* juga ekspresi identitas budaya dari negaranya. Keputusan besarnya mengundurkan diri dari IWC membuatnya bertahan dalam posisi sebagai negara *pro whaling*. Kelompok *anti whaling* sebagai oposisi pemerintahan pun tidak melancarkan banyak aksi untuk menggulingkan atau mengganti status negara Jepang dari *pro whaling* menjadi *anti whaling*. Selain karena kalah jumlah, sistem politik Jepang memang tersentralisasi kepada pihak pemerintah saja. Bahkan kelompok kepentingan *pro whaling* banyak disopiri oleh mantan birokrat FA sehingga kelompok *pro whaling* memiliki posisi yang sulit tergeser. Kesenjangan yang besar juga membuat sulitnya melakukan *check and balance* dalam pemerintahan. Bahkan media massa juga banyak bekerjasama dengan pemerintah dan kelompok *pro whaling* sehingga selalu berusaha mem *framingkan* kegiatan perburuan paus sebagai kegiatan yang positif, kegiatan budaya Jepang, dan kegiatan yang harus dilestarikan kepada publik.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian penulis sejalan dengan hasil pembahasan *Literature Review* karya Putri, Aditama, Holm, McNeill, dan Andini. Secara lebih dalam, menggunakan konsep *strategic culture* yang berdefinisi bahwa budaya sebagai variable yang memengaruhi keputusan sebuah negara, penulis dapat memahami selain mempertahankan budaya, alasan pemerintah Jepang membuat keputusan ini adalah karena adanya kepentingan politik sehingga budaya kegiatan perburuan paus dibungkus oleh para elit pemerintahan sebagai budaya yang harus terus dilestarikan demi merasionalisasi tindakannya yang tidak sejalan ini dengan upaya bersama negara negara lain menjaga kelestarian laut lewat menjaga keberlangsungan stok paus di laut. Terlihat bagaimana terdapat kepentingan yang besar dari pemangku kebijakan dan kelompok kepentingan lainnya untuk mempertahankan adanya kegiatan perburuan

paus di Jepang. Hal ini tercerminkan dari dinamika pemerintahannya yang dikuasai oleh partai *pro whaling*, sistem politiknya yang tersentralisasi dan menjadikan budaya sebagai dasar pembuatan kebijakan, serta upaya upaya yang dilakukan pemerintah dan kelompok kepentingan lain dalam terus mendoktrin masyarakat akan kegiatan perburuan paus sebagai budaya dan identitas mereka. Demi mendapat dukungan dari masyarakat, mereka tidak henti membuat kebijakan *champaign* perburuan paus sebagai tradisi Jepang, dibantu dengan media massa yang bersifat *pro whaling* dan masih ‘disetir’ oleh pemangku kebijakan juga. Kegiatan perburuan paus memanglah sebuah budaya di Jepang, namun terlihat bagaimana budaya *whaling* ini dijadikan instrumen pertahanan kepentingan politik oleh para elit dan demi mempertahankan industrinya. Sejalan dengan pemahaman konsep yang penulis gunakan bahwa kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang simbolis dapat diidealkan oleh para elit demi merasionalisasi tindakan mereka. Setelah diselesaikannya analisis ini, objek penelitian yang awalnya hanya budaya dan pemerintah Jepang, menjadi dapat ditambahkan juga kepentingan nasional Jepang akan kegiatan perburuan paus.

Di samping semua ini, status Jepang yang telah keluar dari keanggotaan IWC tidak membuatnya melakukan perburuan paus dengan brutal. Faktanya, dijelaskan dalam website kementerian luar negerinya bahwa Jepang menetapkan batasan tangkapan paus sesuai yang diatur oleh IWC. Laporannya pun lengkap dan terbuka aksesnya untuk umum. Hal ini menandakan bahwa walau dengan kekuasaan sentralnya, Jepang tetap bersifat transparan dan patuh akan aturan yang ditetapkan IWC dan tetap menghormati aturan PBB, yakni dengan masih toleransi terhadap norma internasional yang ada. Namun, dengan konsep ini, penulis menilai tidak adanya kemungkinan di masa yang mendatang untuk Jepang bergeser menjadi negara *anti whaling* demi mempertahankan budaya dan harga dirinya di hadapan dunia. Penulis juga membuktikan bahwa konsep ini juga bisa digunakan di keputusan negara masalah lingkungan, bukan hanya untuk keputusan bidang militer.

VI.I. Saran

VI.II.I. Saran Praktis

Saran praktis dalam kasus ini penulis tujukan kepada pihak yang masih mempertanyakan alasan penarikan diri Jepang dari *International Whaling Commission* untuk memahami factor keputusannya dari kaca mata budaya. Dalam hal ini, masih banyak kekurangan yang penulis miliki sehingga penulis menyarankan dilakukannya penelitian lebih mendalam hingga melibatkan pemangku kebijakan, seperti missal dari pihak *Fisheries Agency* atau partai *pro whaling* di Jepang, untuk mendapat penjelasan yang konkrit atas kasus ini.

VI.2.2. Saran Akademis

Kajian mengenai analisis factor pengunduran diri Jepang dari *International Whaling Commission* telah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat kekurangan kekurangan penelitian pendukung seperti pembahasan hubungan Jepang dengan negara lain usai keluar dari IWC, macam macam kerjasama yang masih dilakukan, dan yang berhenti dilakukan. Masih kurangnya juga penelitian yang membahas reaksi negara dominan IWC dan bagaimana organisasi tersebut kini berjalan tanpa kehadiran Jepang dengan detail. Penulis berharap bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi kajian-kajian tentang penelitian yang dapat menunjang analisis lebih mendalam lagi terkait faktor penarikan diri Jepang dari IWC. Selain itu penulis menyarankan bagi akademisi atau peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk lebih memvariasikan hasil pembahasan. Menurut penulis, penulisan ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan analisisnya melihat masih banyaknya kekurangan.